**DAFTAR PUSTAKA**

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik,* Edisi Ketiga Jakarta: Erlangga.

Claura, Anggie Veronica. 2015. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Jom Fekon* Vol.2 No.2. Universitas Riau.

Endrayani, Komang Sri, et.al. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *Jurnal* Vol2 No.1. Universitas Pendidikan Ganesha.

Fathia, Nurul. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD di Provinsi Riau). *Jurnal Jom Fekon* Vol4 No.1. Universitas Riau

Halim, Abdul. 2009. *Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*, .

Hartiyani, Siti Johanne. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang. *Skripsi*. Politeknik Negeri Sriwijaya.

Haspiarti. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2002. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*, Jakarta: LAN-RI.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik,* Yogyakarta: Andi.

Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi,* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2011. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Edisi 6 Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Kerangka Konseptual Tahun 2010.

Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20,* Yogyakarta: Andi.

Sanusi, Anwar. 2016. *Metodelogi Penelitian Bisnis,* Jakarta: Salemba Empat.

Soraya, Gita, Rika, Cherrya. 2015. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan. *Jurnal*. STIE Multi Data Palembang.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Wahdatul, Laura, Sri Rahayu, Vaya Juliana Dillak. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan SIstem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal* Vol.3 No.2. Universitas Telkom.

Wahyuni, Raja Adri Satriawan, Surya, Enni Savitri. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD kabupaten rokan hulu). *Jurnal*. Universitas Riau.

Wibisono, Seto. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal* Vol.5 No.9. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).